



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang dasar teoritis yang mencakup teori-teori yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian.

Selain itu, peneliti akan memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang hubungan atau keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dan juga indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi dengan sebab Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. (Suchman, 1995) Teori legitimasi sebagai gagasan bahwa agar organisasi dapat terus beroperasi dengan sukses, ia harus bertindak dengan cara yang dianggap masyarakat dapat diterima secara sosial. (Deegan, 2002). Organisasi harus menyadari betapa pentingnya mereka berada dalam masyarakat karena hubungan kontraktual yang ada di mana kelangsungan hidup dan kemajuan mereka bergantung pada tujuan sosial yang diharapkan masyarakat. (Ullmann, 1979) Perusahaan juga harus berusaha untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan nilai-nilai sosial. Namun, perusahaan harus mematuhi tuntutan sosial yang terus berubah, seperti ekonomi, hukum, dan etika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat membentuk identitas yang positif di mata masyarakat dan mengintegrasikan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Seiring waktu, upaya ini dapat menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.

Untuk memperkuat legitimasinya, PT. Solusi Bangun Indonesia meraih penghargaan PROPER Emas atas keunggulan lingkungan dan komitmen etika bisnisnya, yang menunjukkan kesesuaiannya dengan standar lingkungan dan etika bisnis yang tinggi. Melalui program RDF, PT. SBI memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dan memenuhi harapan pemangku kepentingan, sambil mendukung tujuan keberlanjutan seperti penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan upaya penanganan perubahan iklim.

a. *Legitimacy Theory and the Social Contract* (Teori Legitimasi dan Kontrak Sosial)

Teori legitimasi merupakan kepedulian pemangku kepentingan secara luas tidak terbatas pada masyarakat di mana perusahaan beroperasi. teori ini juga menyatakan bahwa kekuatan pasar dan harapan sosial menentukan keberadaan perusahaan. usaha perusahaan agar berhasil memenangkan perhatian pemangku kepentingan dilakukan dengan memahami luasnya kepentingan public. Salah satu langkah pertama yang penting untuk mempertahankan perusahaan adalah memahami masyarakat.. (Zyznarska-Dworczak, 2017) menyatakan bahwa teori legitimasi memberi tekanan pada anggapan bahwa organisasi harus mempertahankan posisi sosial dengan merespon kebutuhan dan penyediaan apa yang masyarakat inginkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Burlea-schiopoiu, 2013) teori legitimasi merupakan mekanisme yang mendukung perusahaan menerapkan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan secara sukarela guna memenuhi kontrak sosial. Selanjutnya (Shocker & Sethi, 1973), menyatakan bahwa kontrak sosial merupakan penerapan berbagai institusi sosial dan bisnis yang beroperasi dalam masyarakat. Institusi sosial dan bisnis beroperasi dalam masyarakat melalui kontrak sosial. Kontrak antara organisasi dan masyarakat harus tertulis atau tersirat. Penyerahan atau pemberian beberapa keinginan sosial masyarakat secara keseluruhan dan memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan politik kepada kelompok yang memberikan kekuatan bagi institusi sosial dan bisnis adalah dasar dari upaya untuk mempertahankan kehidupan dan pertumbuhan institusi sosial dan bisnis. Oleh karena itu, konsep kontrak sosial mencakup interaksi dan komunikasi yang terus menerus antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, serta hal-hal yang tertulis atau tersirat. Menjaga legitimasi perusahaan juga melibatkan upaya nyata untuk memahami, menghormati, dan menanggapi kebutuhan sosial yang terus berubah.

b. *Legitimacy Theory and Disclosures* (Legitimasi dan pengungkapan Legitimasi)

Perusahaan secara sukarela melaporkan tindakan mereka untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan dan standar masyarakat sekitar. Tampak jelas bahwa peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dihargai. Memberikan legitimasi kepada perusahaan yang beroperasi di dalam masyarakat adalah tugas masyarakat. Perusahaan harus bertahan untuk lulus pengujian legitimasi; jika masyarakat mengetahui

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa perusahaan melanggar perjanjian atau aturan sosial, keberlangsungan perusahaan akan terancam.

Bagian internal perusahaan biasanya tidak melibatkan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bergantung pada laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana perusahaan berhasil. Masyarakat dapat menggunakan informasi yang diberikan untuk menilai perilaku operasional perusahaan dalam situasi di mana operasi perusahaan termasuk pertambangan, penggalian, produksi barang, kehutanan, dan perikanan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah, menunjukkan bahwa pengungkapan aspek sosial dan lingkungan dalam laporan perusahaan menjadi indikator sejauh mana perusahaan mematuhi prinsip-prinsip teori legitimasi.

Gagasan penting yang dijelaskan di atas didukung oleh Porter ME, (2011) dalam kaitannya dengan konsep kelangsungan hidup perusahaan. selanjutnya perusahaan membutuhkan legitimasi melanjutkan operasinya. Salah satu cara memperoleh legitimasi adalah melaporkan isu sosial dan lingkungan. (Burlea-schiopoiu, 2013) setuju dengan hal ini. Mereka berpandangan bahwa tantangan/isu baru terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan menentukan bahwa perusahaan dan pemerintah harus mematuhi menghormati aturan, nilai dan norma dan sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan untuk membuktikan kepatuhan.

c. Gap Legitimasi (Kesenjangan Legitimasi)

Legitimasi menjadi objek yang terus berubah di bawah pengaruh berbagai pihak. Secara esensial, (Guthrie et al., 2006) menyampaikan bahwa harapan masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan secara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perlahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada suatu waktu tertentu, kecocokan antara tindakan institusi dan nilai-nilai sosial dapat dipenuhi. Pemikiran Guthrie ini juga mendapat dukungan dari pandangan Islam (2017). Lebih lanjut, proses legitimasi di antara beragam pihak menjadi sasaran yang terus bergerak, karena setiap peristiwa atau insiden baru dapat menyebabkan perubahan.

Fakta bahwa legitimasi bersifat dinamis mengimplikasikan bahwa perusahaan perlu bersikap pragmatis. (Guthrie 2006) berpendapat bahwa perusahaan dianggap pragmatis jika mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan di mana mereka beroperasi. Dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dinamis, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk terus beradaptasi.

Perubahan dalam lingkungan perusahaan saat ini dapat menghasilkan pergeseran dalam harapan. (Guthrie 2006) mengidentifikasi bahwa perubahan ini dapat menciptakan suatu kesenjangan legitimasi, yang didefinisikan oleh Lindblom (1994) sebagai perbedaan antara harapan pemangku kepentingan yang relevan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan. Konsep gap legitimasi, sebagaimana dijelaskan oleh Islam (2017), bergantung pada persepsi hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Gambar 2.1 secara grafis menggambarkan konsep kesenjangan legitimasi. Seperti dibahas di atas, kesenjangan legitimasi mengacu pada “perbedaan antara harapan para pemangku kepentingan terkait mengenai bagaimana suatu organisasi harus bertindak, dan bagaimana organisasi tersebut bertindak. Ruang di antara kurva menunjukkan perubahan ekspektasi (sumbu vertikal)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

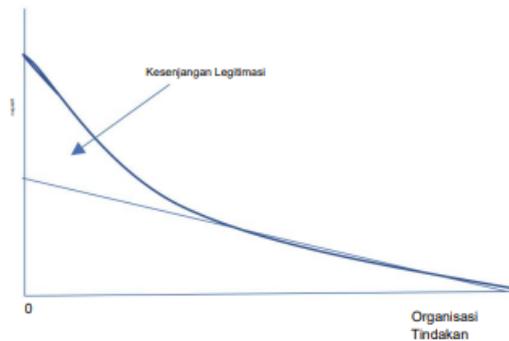
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap harapan pemangku kepentingan yang relevan terkait dengan tindakan organisasi yang dianggap tetap.

Gambar 2. 1

Grafis Kesenjangan Legitimasi



Sumber: (Moloi & Marwala, 2020)

Islam, (2017), menyatakan terdapat dua sumber sumber utama legitimasi, yaitu:

- a. Pertama, perubahan harapan masyarakat yang disebabkan karena pergeseran dari apa yang diharapkan dengan apa yang perusahaan yang dapat berikan. Perubahan harapan masyarakat akan menciptakan gap yang muncul karena praktik perusahaan tidak berubah
- b. Kedua, asimetri informasi perubahan yang dihasilkan dari munculnya informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang perusahaan Islam (2017),

Suatu organisasi harus merancang strategi untuk mengatasi kesenjangan legitimasi. Keberadaan strategi legitimasi menjadi krusial bagi organisasi, terutama dalam menghadapi potensi ancaman. (Fiedler & Deegan, 2002) menjelaskan bahwa strategi tersebut melibatkan aspek pengungkapan informasi yang terfokus dan kerja sama dengan entitas lain yang dianggap memiliki wewenang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Lindblom C, 1994) menyampaikan bahwa terdapat empat jalur tindakan yang dapat diambil oleh suatu organisasi guna menjaga legitimasinya (Mousa, et. al., 2015) menguraikan langkah-langkah praktis dari empat jalur tindakan yang dikemukakan oleh Lindblom C (1994)

- a. Suatu organisasi dapat melakukan penyesuaian terhadap keluaran, tujuan, dan metode operasionalnya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku. Dengan demikian, organisasi berupaya memenuhi standar dan harapan yang ada.
- b. Melalui komunikasi, sebuah organisasi dapat berusaha untuk mengubah definisi legitimasi sosial agar sesuai dengan praktik, keluaran, dan nilai-nilai yang dimiliki saat ini. Upaya ini dapat dilakukan untuk menciptakan pemahaman yang lebih positif terkait legitimasi organisasi.
- c. Dengan menggunakan komunikasi sebagai alat, organisasi dapat berusaha untuk diidentifikasi dengan simbol, nilai, atau institusi yang memiliki dasar legitimasi yang kuat. Dengan demikian, organisasi menciptakan koneksi yang lebih erat dengan aspek-aspek yang dianggap sah oleh masyarakat.
- d. Perusahaan juga mungkin berusaha mendapatkan legitimasi dengan menciptakan kesan bahwa mereka berada pada jalur yang benar atau tidak terlibat dalam tindakan yang salah. Meskipun penampilan tersebut mungkin tidak selalu mencerminkan kinerja lingkungan perusahaan secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan sebagai strategi untuk membangun citra positif dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan.

Dalam perspektif O'DonovanG(2002), ketika suatu organisasi Menghadapi ancaman terhadap legitimasinya, langkah pertama yang diambil adalah memulai

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



proses legitimasi yang ditargetkan pada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai "publik yang memberikan legitimasi". Proses ini mewajibkan organisasi untuk secara aktif terlibat dalam mengelola isu-isu legitimasi yang muncul.

(Islam, 2017) memberikan pandangan tambahan mengenai pengelolaan legitimasi dengan menyoroti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi:

- a. Mengidentifikasi publik yang memberikan penghargaan sebagai langkah awal dalam memahami dan merespon secara efektif terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
- b. Menetapkan nilai-nilai sosial dan lingkungan masyarakat yang memberikan nilai dan persepsi terhadap variabel-variabel tekanan publik terhadap perusahaan. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap norma-norma yang diterima oleh masyarakat.
- c. Menentukan tujuan dari setiap potensi respons organisasi terhadap ancaman legitimasi, dengan fokus pada mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- d. Menentukan taktik dan opsi pengungkapan yang tersedia dan sesuai untuk mengelola legitimasi. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap jenis informasi yang akan diungkapkan dan cara komunikasi yang paling efektif untuk menjaga atau memulihkan legitimasi organisasi.

Dalam mempertimbangkan aspek-aspek ini, organisasi diharapkan dapat mengelola legitimasi mereka secara lebih efektif dan responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori pemangku kepentingan

Menurut Freeman & David, (1983) pemangku kepentingan memiliki dua pengertian. Dalam konteks yang lebih luas, pemangku kepentingan didefinisikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Kelompok ini mencakup berbagai entitas seperti kelompok kepentingan publik, kelompok protes, lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja, karyawan, segmen pelanggan, pemilik saham, dan lainnya.

Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai kelompok atau individu yang esensial bagi kelangsungan hidup organisasi. Ini mencakup karyawan, segmen pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintahan utama, pemilik saham, lembaga keuangan tertentu, dan entitas lain yang krusial bagi eksistensi dan operasionalitas organisasi. Banyak manfaat keterlibatan *stakeholder* telah ditemukan dalam penelitian empiris. Misalnya, penelitian empiris menemukan bahwa keterlibatan *stakeholder* memungkinkan organisasi mengakses informasi yang dapat digunakan untuk memahami dan menanggapi masalah sosial dan lingkungan. Katsoulacos & Katsoulacos, (2007) berpendapat bahwa menjalin hubungan dengan *stakeholder* yang menguntungkan mendukung perkembangan pengetahuan dalam organisasi. juga mengidentifikasi bahwa melibatkan pemangku kepentingan utama semakin penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang

Kaitanya dengan PT. Solusi Bangun Indonesia pada teori pemangku kepentingan ini yaitu dimana PT. Solusi Bangun Indonesia telah membentuk tim Corporate Environment dan *Sustainability* Departement yang bertujuan untuk secara fokus dan merancang solusi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang salah satu wujud dari program strategisnya yaitu *Refused Derived Fuel* sebagai konsep alternatif bahan bakar.

3. *Theory of change* (TOC)

Saat ini, kita semakin menyadari bahwa kita hidup dalam zaman perubahan daripada zaman kepastian. Ketidakpastian, perbedaan, paradoks, dan kontradiksi mengatur tindakan dan konfigurasi masyarakat, negara, dan institusi pemerintah di era ini. Dinamika ini terjadi di tingkat individu, organisasi, dan sosial. (James, 2011) Keyakinan bahwa kita memiliki kontrol atas proses sosial dan keteraturan adalah salah satu contoh bagaimana pola pikir kita dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan sosial kontemporer. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan Kerangka Logis dogmatis oleh agen pembangunan sebagai alat untuk mengelola proyek pembangunan. Pendekatan kuantitatif dianggap sebagai metode terbaik untuk mengukur kebenaran karena terdapat kecenderungan untuk meyakini kebenaran mutlak, statis, dan kepastian total.

(Rogers, 2014) Perubahan sosial membutuhkan kemampuan untuk belajar dari masa depan yang belum dapat sepenuhnya dipahami saat ini. pengembangan Teori Perubahan memberikan alat untuk memantau tindakan dan membuka ruang akuntabilitas terhadap diri sendiri dan pemangku kepentingan. Penggunaan TOC secara menyeluruh membantu dalam penilaian asumsi, penyederhanaan kompleksitas konteks, dan pembuatan strategi.

Teori perubahan dibagi menjadi tiga level: level organisasi, level individu, dan level sosial. Pada level organisasi, organisasi atau individu dapat beradaptasi melalui proses metamorfosis atau berkembang yang memungkinkan internalisasi memiliki gagasan baru, seperti penggunaan sumber terbarukan untuk mengurangi dampak negatif, dan mengintegrasikannya ke dalam operasi perusahaan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terjadi di PT. Solusi Bangun Indonesia. Pada level individu, nilai-nilai baru diterapkan melalui mekanisme sosialisasi yang berkelanjutan, mengubah pandangan dunia individu dan menciptakan kesadaran baru, yang dalam konteks Solusi Bangun Indonesia, seperti penggunaan *Refused Derived Fuel* sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan. Pada level sosial, harmonisasi nilai-nilai melalui struktur organisasi dan individu menghasilkan aturan baru dan lingkungan sosial yang mendukung, seperti adopsi program strategis *Refused Derived Fuel* sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Dengan demikian, penggunaan *Refused Derived Fuel* di Solusi Bangun Indonesia mencerminkan perubahan yang lebih mendalam di tingkat organisasi, individu, dan sosial dalam pandangan dan praktik terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat teori perubahan adalah (Eguren, 2011).

- a. Latihan Visualisasi secara sadar dan kreatif yang memungkinkan kita memfokuskan energi kita pada realitas masa depan tertentu yang tidak hanya diinginkan
- b. Serangkaian asumsi dan proyeksi abstrak mengenai bagaimana meyakini kenyataan dapat terjadi dalam waktu dekat, berdasarkan.
 - 1) Analisis realistis terhadap konteks saat ini
 - 2) Penilaian mandiri mengenai kemampuan dalam memfasilitasi proses
 - 3) Dan yang terakhir penilaian kritis dan tinjauan eksplisit atas asumsi penulis.
- c. Pendekatan yang membantu mengidentifikasi tonggak sejarah dan kondisi yang harus terjadi dalam perjalanan menuju perubahan yang ingin terwujud
- d. Latihan pembelajaran berdasarkan pengalaman yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan kolaboratif yang mendorong pengembangan logika

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fleksibel yang diperlukan untuk menganalisis proses perubahan sosial yang kompleks

- e. Peta Perubahan semi-terstruktur yang menghubungkan tindakan strategis kita dengan hasil proses tertentu yang ingin kita sumbangkan agar terjadi dilingkungan sekitar kita
- f. Sebagai alat untuk memantau secara sadar dan kritis cara berpikir dan bertindak individu dan kolektif kita.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. *Environmental, Social, Government, (ESG)*

Meningkatnya kesadaran seputar lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Governance*) telah mengubah mindset bisnis dan investasi di dunia. *Environmental Social Governance* atau ESG adalah prinsip dan standar pengelolaan bisnis dan perusahaan yang mengikuti kriteria-kriteria tertentu agar berdampak positif bagi lingkungan (*environment*), Sosial-kemasyarakatan (*Social*), dan tata kelola perusahaan. Pilar ini digunakan sebagai konsep pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan keberlanjutan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mematuhi standar ini akan mengintegrasikan ketiga kriteria ini dalam operasional bisnis dan dalam pengambilan keputusan ESG IBM, (2022).

CSR dan ESG (*Environmental, Social and Governance*) pada dasarnya memiliki aspek yang mirip yaitu cara perusahaan untuk memperlihatkan kepeduliannya terhadap dampak dari aktivitas bisnis yang dijalannya dengan berfokus pada kelestarian lingkungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Namun, ESG menjadi terminologi yang lebih luas dibandingkan dengan CSR. ESG mengacu pada kepentingan dalam keputusan investor seperti istilah “ESG Investing”, “Responsible Investing”, “Impact Investing” yang merupakan istilah lebih luas bagi investor yang mengintegrasikan aspek ESG kedalam keputusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



investasi mereka. Sedangkan CSR mengacu pada peran perusahaan itu sendiri dalam melakukan tanggung jawab sosial. Menurut Gillan et al. (2021), perbedaan ESG dan CSR terletak pada aspek tata kelola. Tata kelola menjadi hal penting yang juga harus diperhatikan karena menyangkut pada transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Gillan et al. (2021) menjelaskan bahwa aspek tata kelola secara eksplisit mencakup dalam ESG, sedangkan dalam CSR aspek tata kelola mencakup secara tidak langsung dikarenakan berkaitan dengan adanya pertimbangan aspek lingkungan dan sosial.

Pengungkapan lingkungan dan sosial berdampak pada organisasi terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan lingkungan. Kinerja Lingkungan (*Environmental*) seperti emisi karbon, emisi gas rumah kaca, pengungkapan atau pengukuran, pelaporan, perubahan iklim, kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, izin usaha, polusi, energi yang terbarukan, penipisan sumber daya alam, serta pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia yang beracun, dan lainlain. Sedangkan kinerja sosial dilihat dari kesejahteraan sosial sekitar fasilitas yang mengakibatkan resiko sosial, seperti upah tenaga kerja, kontribusi dan risiko politik, pelecehan seksual, perbudakan, pemilihan dewan penasehat *pada executive compensation*, dan lain-lain. Tata kelola (*Governance*) dilihat dari hubungan *stakeholder* perusahaan, hak *stakeholder*, pembagian posisi jabatan, pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain

Sebagian besar peneliti menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan kinerja ESG yang ditemukan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Xaviera & Rahman, (2023) menemukan bahwa semakin tinggi kinerja ESG perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Aboud & Diab (2018) dan Fatemi et al. (2018)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyimpulkan bahwa kinerja ESG yang tinggi berpengaruh pada nilai perusahaan yang juga tinggi, sedangkan pada perusahaan berkinerja ESG yang rendah akan cenderung memperoleh nilai perusahaan yang juga rendah. Beberapa penelitian lain, menemukan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Behl et al. (2022) dari India, yang menemukan bahwa kinerja *environmental dan social* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dalam jangka pendek. Penelitian dari China menemukan bahwa pengungkapan CSR yang positif secara signifikan mengurangi nilai perusahaan. Selain itu, hubungan negatif antara CSR dan nilai perusahaan lebih menonjol pada tahap matang. Selanjutnya, penelitian dari Jerman menemukan bahwa kinerja ESG beserta pilarnya tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Standar GRI (Global Reporting Initiative)

Global Reporting Initiative (GRI) adalah salah satu lembaga yang memberikan contoh panduan atau rambu – rambu untuk penyajian *sustainability report*. GRI merupakan organisasi berbasis jaringan yang menjadi pelopor penyusunan kerangka *sustainability report*. GRI (2016) menjelaskan bahwa mereka adalah organisasi nirlaba (*non- profit*) internasional yang bekerja untuk kepentingan publik dengan visi ekonomi global berkelanjutan di mana organisasi mengelola kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola secara bertanggung jawab

GRI *Standards* berisikan ketentuan yang harus dilaporkan, dan yang tidak wajib dilaporkan, atau referensi lain yang dapat digunakan untuk pelaporan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan harus melaporkan kegiatan bisnis mereka dengan menggunakan pedoman GRI *Standards* agar dapat dilihat oleh masyarakat mengenai kegiatan keberlanjutan seperti CSR yang dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Selain itu *Standards* GRI adalah sebuah *Framework* sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yang dirancang agar tercipta pemahaman yang sama bagi organisasi dan pemangku kepentingan, sehingga informasi atas dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari berbagai organisasi dapat dikomunikasikan, dipahami dan diperbandingkan secara global.

Dengan adanya GRI sebagai standar pelaporan dalam mengukur tingkat praktik berkelanjutan, membuat beberapa organisasi Indonesia mulai serius mengelola aspek Pelaporan Keberlanjutan. Bahkan saat ini Standar GRI telah tersedia dalam Bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pengadopsian standar ini oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Crisostomo, Prudencio, dan Forte (2017) menyimpulkan bahwa GRI adalah alat yang menstimulasi pengungkapan praktik CSR dan Keberlanjutan di seluruh dunia. Terlihat bahwa GRI merupakan dorongan untuk praktik positif perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap *stakeholder*. GRI (2016) menjabarkan prinsip-prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan terdiri dari:

GRI standard merupakan Standard yang terus diperbarui mengikuti keadaan saat ini atau sesuai dengan keadaan *Sustainability* Global. Pada tahun 2016 GRI menciptakan *Standard* GRI 2016 dan pada tahun 2021 menciptakan kembali GRI standard 2021, Dan GRI *standard* 2021 tersebut mulai diadopsi oleh GRI atau Emiten mulai tanggal 1 Januari 2023.

Didalam perbedaan GRI 2021 dan GRI 2016 sangat banyak perbedaan tetapi satu hal yang penting dari perubahan ini, GRI 2021 lebih menekankan atau memiliki komponen yang kuat kepada Hak Asasi Manusia, Jadi perusahaan dalam melaporkan *Sustainability report* juga harus melaporkan apa saja yang telah dilakukan untuk memastikan kepatuhan Hak Asasi Manusia didalam operasional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bisnisnya, selain itu juga GRI Standard 2021 diwajibkan menceritakan komitmen mereka terhadap *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sejauh mana mereka berkomitmen untuk terlibat dalam *Sustainable Development Goals* dan perbedaan yang selanjutnya yaitu dari strukturnya dalam GRI 2021 tidak ada lagi GRI seri 101,102, dan 103 terdapat aspek besar secara struktur yang pertama yaitu *Standard Universal* yang wajib digunakan bila menggunakan standard GRI, *Standard Universal* berisi tentang informasi dasar perusahaan, komitmen keberlanjutan perusahaan, dan juga digunakan sebagai rambu-rambu bila perusahaan menceritakan bagaimana mereka mengidentifikasi dampak negatif, dampak positif, dampak aktual, dan dampak potensial dari operasional bisnis, Kemudian aspek kedua adalah sektor *Standards* yang dibuat khusus untuk sektor tertentu saat ini GRI sudah merilis sektor *standard* untuk minyak dan gas, agrikultur, akuakultur, dan perikanan. *Standard* Sektor ini sudah memberikan rambu-rambu dan *issue-issue Sustainability* apa yang harus dituliskan *Sustainability Reports* bila perusahaan berasal dari sektor tersebut, karena didalam sektor *Standards* tersebut sudah ada bagian-bagian apa saja yang harus dilaporkan, Aspek yang ketiga yaitu *Topics Standards* yang terdiri dari standar GRI 200 untuk kinerja ekonomi, GRI Standard 300 lingkungan hidup, Gri *Standard* 400 sosial. Topik *Standards* ini digunakan untuk melaporkan masalah-masalah *Sustainability* yang ada di sektor *standards*, jika berasal dari sektor tertentu dan sudah ada sektor standardnya dari GRI dan melihat apa saja yang harus dilaporkan, baru setelah itu dapat menggunakan GRI topik *standards* untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Namun jika perusahaan tersebut belum ada sektor standard dari GRI

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





maka perusahaan tersebut dapat menggunakan Topik Standard untuk melaporkan masalah-masalah apa yang ingin dilaporkan.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), Konsep ini terbentuk dari Para Pemimpin dunia Secara resmi pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Latar belakang diciptakan *SDGs* yaitu bertujuan menjaga pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga pembangunan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konsep *SDGs* ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, *SDGs* memiliki sasaran yang lebih universal. *SDGs* dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. konsep *SDGs* melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)* di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti *SDGs*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan target yang berhubungan dengan perkembangan internasional di masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



depan. Target tersebut dibuat oleh perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada bulan Agustus 2015 193 negara menyetujui 17 tujuan berikut ini:

- 1) Menghapuskan kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
- 2) Menghapuskan kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Hidup sehat. Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
- 4) Pendidikan berkualitas. Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
- 5) Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
- 6) Air bersih dan sanitasi. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
- 7) Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
- 8) Ekonomi dan pekerjaan yang baik. Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Inovasi dan infrastruktur yang baik. Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 10) Mengurangi kesenjangan. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
- 11) Kota dan komunitas yang berkesinambungan. Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
- 12) Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
- 13) Tindakan iklim. Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
- 14) Lautan yang berkesinambungan. Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
- 15) Penggunaan tanah yang berkesinambungan. Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
- 16) Kedamaian dan keadilan. Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
- 17) Kemitraan untuk pengembangan yang lestari. Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Terdapat 7 (Tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari pada MDGs sebagai berikut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
- 2) Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
- 3) MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
- 4) SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
- 5) Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
- 6) PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.
- 7) *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



MGDs dan SDGs mempunyai persamaan dan kesamaan tujuan yang sama.

Yakni, SDGs melanjutkan cita-cita mulia MGDs yang ingin konsen menganggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millenium Development Goals perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama sustainable development goals.

c. Aspek Material dan *Boundary* Teridentifikasi

Global Reporting Initiative (GRI) mengeluarkan pengungkapan standar dengan indikator G4-17 hingga G4-23. Pengungkapan standar ini mengacu pada panduan tentang cara organisasi menentukan konten laporan, aspek material, dan *boundary*.

Untuk menentukan aspek material dan *Boundary*, berikut adalah prosesnya.

Langkah 1: Identifikasi – Ikhtisar

Proses tersebut dimulai dengan melakukan identifikasi Aspek dan topik relevan lainnya, dan *Boundary*, yang dipertimbangkan untuk dilaporkan. Identifikasi ini didasarkan pada prinsip konteks keberlanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan. Saat menilai sejumlah kemungkinan topik yang relevan, organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua prinsip tersebut. Organisasi harus mengidentifikasi aspek dan topik lainnya yang relevan berdasarkan dampak yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan, terlepas dari apakah dampak tersebut terjadi dalam atau luar organisasi. Bagi Organisasi yang baru mengenal pelaporan keberlanjutan biasanya akan fokus pada dampak yang terjadi di dalam organisasi, selanjutnya sejalan dengan semakin matangnya praktik pelaporan, dampak di luar organisasi yang lebih luas harus dipertimbangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Langkah 2: Prioritas – Ikhtisar

Langkah selanjutnya dalam menentukan konten laporan adalah prioritas Aspek dan topik relevan lainnya dari langkah 1, untuk mengidentifikasi hal-hal yang material dan akan dilaporkan. Prioritas harus berdasarkan pada prinsip Materialitas dan pelibatan pemangku kepentingan. Saat menetapkan tingkat prioritas, organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua prinsip ini

Langkah 3: Validasi – Ikhtisar

Langkah ini diikuti dengan validasi dimana prinsip kelengkapan dan pelibatan pemangku kepentingan diterapkan untuk mematangkan proses identifikasi konten laporan. Saat memvalidasi Aspek material yang teridentifikasi (atau topik material lainnya), Organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua prinsip ini.

Hasil tiga langkah pertama diatas adalah daftar aspek material (dan topik material lainnya) dan *Boundary*, Daftar Aspek Material (dan topik material lainnya) akan menentukan daftar pengungkapan standar khusus apa yang harus disusun oleh organisasi terkait dengan aspek tersebut, yang harus diungkapkan dalam laporan.

4) Langkah 4: Reviu – Ikhtisar

Langkah terakhir, setelah laporan diterbitkan, organisasi harus melakukan *review* terhadap laporannya. *Review* ini dilakukan saat organisasi sedang menyiapkan siklus pelaporan berikutnya. Reviu berfokus tidak hanya pada aspek Material dalam periode pelaporan sebelumnya tetapi juga mempertimbangkan kembali prinsip pelibatan pemangku kepentingan dan konteks keberlanjutan. Temuan-temuan dari kegiatan ini akan memberikan informasi dan masukan bagi langkah identifikasi pada siklus pelaporan berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Proses-proses di atas membantu organisasi dalam menentukan apa yang harus disertakan dalam laporan berdasarkan pentingnya dan dampaknya terhadap *stakeholder* dan kinerja berkelanjutan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, organisasi dapat memastikan bahwa laporan mereka mencerminkan kebutuhan dan harapan *stakeholder*, serta memenuhi standar pengungkapan yang ditetapkan oleh GRI. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap dampaknya pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip pelaporan menurut standar GRI 2016

1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Organisasi diharapkan melibatkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pelaporan. Ini mencakup mendengarkan dan merespons kebutuhan, kepentingan, dan harapan pemangku kepentingan yang beragam.

2) Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan informasi dalam konteks keberlanjutan yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi organisasi. Ini mencakup penilaian dampak organisasi terhadap keberlanjutan pada tingkat lokal, regional, dan global.

3) Materialitas

Informasi yang disajikan dalam laporan harus material, yaitu relevan dan signifikan terhadap keputusan pemangku kepentingan. Organisasi harus mengidentifikasi dan mengungkapkan aspek-aspek yang dianggap material, mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Kelengkapan

Laporan harus mencakup semua informasi yang relevan dan material yang diperlukan untuk memahami dampak organisasi terhadap keberlanjutan. Informasi harus disajikan secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan memahami konteks dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa laporan organisasi mencerminkan kepentingan dan dampak terhadap berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan informasi yang relevan dan signifikan untuk pengambilan keputusan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi diharapkan dapat membangun laporan keberlanjutan yang dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik-praktik mereka terkait dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI G4 (Generasi ke-4) dan GRI 2016 mengakui pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan keberlanjutan. Pelibatan ini memastikan bahwa laporan mencerminkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang beragam, dan membantu meningkatkan kualitas dan relevansi informasi yang disampaikan. Berikut adalah cara standar GRI G4 dan GRI 2016 mendorong pelibatan pemangku kepentingan:

1) G4-24 (GRI 102-40)

Organisasi harus membuat daftar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dan menyediakannya. Ini mencakup identifikasi dan dokumentasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan atau dampak signifikan terhadap organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2) G4-25 (GRI 102-42)

Organisasi diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang dasar yang digunakan untuk menentukan dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses keterlibatan. Dengan kata lain, organisasi diharapkan untuk menjelaskan alasan yang mendorong mereka untuk memilih kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses keterlibatan.

G4-26 (GRI 102-43)

Meminta organisasi untuk menjelaskan bagaimana mereka melihat keterlibatan pemangku kepentingan, seberapa sering mereka terlibat, dan apakah keterlibatan tersebut termasuk dalam proses membuat laporan.

G4-27 (GRI 102-44)

Organisasi harus melibatkan pemangku kepentingan, mengungkapkan masalah utama, dan kemudian melaporkan bagaimana ia menangani masalah tersebut.

d. *Carbon Disclosure Project*

Carbon Disclosure Project (CDP) menetapkan standar pengungkapan emisi GRK. CDP adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai sistem pengungkapan untuk investor, perusahaan, kota, dan negara bagian serta untuk mengelola dampak lingkungan mereka. Sejak itu, organisasi ini telah memperluas lingkup pengungkapan lingkungannya untuk mencakup keamanan air dan deforestasi, serta memperluas jangkauan untuk membantu kota, negara bagian, dan wilayah. CDP telah menjadi platform pelaporan yang efektif di Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara dan Oceania. Jumlah orang yang terlibat dalam pelaporan ini terus meningkat setiap tahun. Lebih dari 100 perusahaan Indonesia dan 21 kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan pemerintah daerah memilih untuk bekerja sama dengan CDP Indonesia untuk melakukan analisis risiko iklim.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CDP menerbitkan panduan untuk perusahaan agar mengungkapkan emisi GRK dalam bentuk permintaan informasi. Permintaan informasi adalah sebuah kuisisioner yang berisi pertanyaan tentang perubahan iklim. Perusahaan yang akan memberikan informasi ini dengan sukarela akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam laporan keberlanjutannya. CDP menerbitkan panduan untuk perusahaan untuk mengungkapkan emisi GRK dalam bentuk permintaan informasi. Permintaan informasi adalah sebuah kuisisioner yang berisi pertanyaan tentang perubahan iklim. Perusahaan yang akan memberikan informasi ini dengan sukarela akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam laporan keberlanjutannya. Terdapat lima belas modul dalam permintaan informasi, yang mencakup pendahuluan, tata kelola, risiko dan peluang, strategi bisnis, target dan kinerja, metodologi, emisi, data emisi, gangguan emisi, energi, metrik tambahan, verifikasi, harga karbon, keterlibatan, dampak pengelolaan lahan tambahan, dependensi modul, dampak portofolio, keanekaragaman hayati, dan penutup modul, yang berisi pertanyaan tentang masalah perubahan iklim yang paling sering disebabkan oleh perubahan iklim. Dari 15 modul tersebut, terdapat 173 pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan yang ingin melakukan pengungkapan terkait emisi GRK.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Choi et al. (2013). Ia membuat checklist berdasarkan 173 pertanyaan dari permintaan informasi yang diterbitkan oleh CDP. *Checklist* terdiri dari 18 pertanyaan (Sub-kategori) dan dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu:

- 1) Perubahan iklim: risiko dan peluang
- 2) Akuntansi emisi GRK

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Akuntansi konsumsi energi
- 4) Pengurangan GRK dan biaya
- 5) Akuntabilitas emisi karbon

Jika informasi yang diungkapkan tentang laporan keberlanjutan, terutama tentang emisi GRK, sesuai dengan standar yang ada, laporan keberlanjutan dapat dianggap berkualitas. Perusahaan akan berusaha menunjukkan tanggung jawab lingkungan mereka dengan memberikan informasi lingkungan. Tanggung jawab ini memperhatikan biaya lingkungan, yang merupakan pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasional perusahaan. Biaya lingkungan ini dianggap dapat mengurangi emisi karbon perusahaan dan mungkin memaksa perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya.

e. **Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Proper merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, Proper juga mencerminkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Implementasi ini merupakan usaha Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Kriteria *beyond compliance* ini bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, serta isu-isu lingkungan global yang relevan. Proper.menlhk,(2021) Tim teknis bertanggung jawab merumuskan kriteria-kriteria terkait dengan pelaksanaan PROPER, dengan mempertimbangkan masukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER. Aspek-aspek yang dievaluasi dalam kriteria *beyond compliance* mencakup: Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Upaya Efisiensi Energi, Upaya Pengurangan Emisi, Implementasi Konsep *Rethink, Refuse, Reduce, Reuse & Recycle* Limbah B3, Implementasi Konsep *Rethink, Refuse, Reduce, Reuse & Recycle* Limbah Non-B3, Konservasi Air dan Pengurangan Beban Pencemaran Air Limbah, Perlindungan Keanekaragaman Hayati, serta Program Pengembangan Masyarakat. PROPER, (2020)

Penilaian PROPER menggunakan warna-warna khusus yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk lebih memprioritaskan pelestarian lingkungan. Penilaian proper emas bukan hanya melihat pengukuran instrumen dari pencapaian dampak positif dari komite yang menerima tetapi juga dari keseriusan tata kelola perusahaan dan keseriusan tata kelola hukum, hukum ini diantaranya hukum lingkungan hidup, hukum tenaga kerja, dan ketaatan dalam melakukan perpajakan Berikut beberapa kriteria warna dalam penilaian Proper:

- 1) PROPER Emas: Warna ini menandakan upaya kegiatan perusahaan yang sudah melebihi dilakukan perusahaan telah konsisten melibatkan keunggulan lingkungan dalam melakukan produksi, melakukan aktivitas bisnis dengan memperhatikan etika serta memiliki tanggung jawab
- 2) Proper Hijau: Warna yang selanjutnya yaitu Hijau yang melambangkan bahwa upaya aktivitas perusahaan mengelola lingkungan telah melebihi dari yang dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditentukan
- 3) PROPER Biru: adalah perusahaan Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang



berlaku (telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh KLH) ini adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang:

- a) Penilaian Tata Kelola Air
- b) Penilaian Kerusakan Lahan
- c) Pengendalian Pencemaran Laut
- d) Pengelolaan Limbah B3
- e) Pengendalian Pencemaran Udara
- f) Pengendalian Pencemaran Air
- g) Implementasi AMDAL

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4) PROPER Merah: adalah perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang:

- a) Penilaian Tata Kelola Air
- b) Penilaian Kerusakan Lahan
- c) Pengendalian Pencemaran Laut
- d) Pengelolaan Limbah B3
- e) Pengendalian Pencemaran Udara
- f) Pengendalian Pencemaran Air
- g) Implementasi AMDAL

5) PROPER Hitam: adalah peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, Belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan, dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya oleh KLH dalam bidang:

- a) Penilaian Tata Kelola Air

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Penilaian Kerusakan Lahan
- c) Pengendalian Pencemaran Laut
- d) Pengelolaan Limbah B3
- e) Pengendalian Pencemaran Udara
- f) Pengendalian Pencemaran Air
- g) Implementasi AMDAL

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kriteria ketaatan tersebut digunakan untuk pemeringkatan adalah biru, merah dan hitam. Sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) adalah hijau dan emas

Perusahaan kini dihadapkan pada tanggung jawab yang melampaui aspek ekonomi semata, yaitu nilai perusahaan yang tercermin dalam kesehatan keuangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan ekonomis semata, melainkan juga memiliki kewajiban terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pendekatannya adalah bahwa mengandalkan keuangan saja tidak cukup untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Keberlanjutan dapat tercapai jika perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam buku "*A Journey to Gold*" (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Pemilihan program utama untuk pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena merupakan salah satu faktor penilaian oleh Dewan Pertimbangan PROPER untuk menilai apakah perusahaan layak menerima PROPER Emas.

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada tahun 2017 tentang Laporan Keberlanjutan untuk entitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperti lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang menggambarkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalank. Dalam peraturan tersebut, OJK menyatakan bahwa beberapa informasi harus disertakan dalam Laporan Keberlanjutan:

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1) Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagian ini memberikan gambaran rinci tentang pendekatan dan strategi keberlanjutan yang diadopsi oleh perusahaan. Ini mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial, praktik-praktik berkelanjutan, inisiatif lingkungan, serta bagaimana perusahaan memastikan keberlanjutan dalam operasionalnya.

2) Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Bagian ini memberikan ringkasan kinerja perusahaan selama tiga tahun terakhir dalam tiga aspek utama keberlanjutan: sosial (pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan), ekonomi (jumlah produk dan jasa, pendapatan), dan lingkungan (energi, emisi, dan limbah). Ini bisa mencakup grafik, tabel, atau data kuantitatif lainnya untuk memudahkan pemahaman.

3) Profil Singkat

Bagian ini memberikan informasi singkat tentang perusahaan, termasuk visi, misi, alamat kantor, dan kontak yang dapat dihubungi. Juga mencakup ukuran bisnis, jenis produk atau jasa yang ditawarkan, dan ringkasan fitur utama yang membedakan perusahaan dari yang lain.

4) Penjelasan Direksi

Hal ini menjelaskan peran dan tanggung jawab dewan direksi dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Ini mencakup prosedur yang digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merencanakan dan melaksanakan strategi keberlanjutan, serta cara evaluasi dan pengukuran kinerja.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5) Tata Kelola Keberlanjutan

Berikutnya yaitu membahas tata kelola keberlanjutan, termasuk penjelasan tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, cara menangani risiko keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial), serta bagaimana organisasi melibatkan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan.

6) Kinerja Keberlanjutan

Bagian ini memberikan rincian tentang kinerja keberlanjutan perusahaan selama tiga tahun terakhir. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk membangun budaya keberlanjutan, inisiatif untuk memperbaiki kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta tanggung jawab pengembangan produk atau jasa.

7) Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, jika ada

Pada Bagian terakhir ini menyajikan informasi tentang apakah kinerja keberlanjutan perusahaan telah diverifikasi oleh pihak independen. Jika ya, termasuk rincian verifikasi, sertifikasi, atau tinjauan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memvalidasi klaim dan data keberlanjutan.

5. SROI (Social Return on Investment)

Metode *Social Return on Investment* (SROI) pada dasarnya lahir seiring perkembangan social enterprise yang begitu pesat diberbagai belahan dunia di mana Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam mengukur eektivitas program/proyek sosial yang mereka jalankan. Isu-isu dibidang sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, lapangan pekerjaan imigran, krisis ekonomi, kini telah menjadi tren isu diberbagai kancah forum internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disamping itu, topik-topik tentang lingkungan hidup ini telah mendominasi pembicaraan antara para petinggi negara di dunia, seperti isu tentang pemanasan global, emisi gas karbon dioksida, konservasi hutan tropis, eksplorasi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan sebagainya. Ada kesadaran yang tumbuh dewasa ini dimasyarakat dunia, bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya bertujuan untuk mencari profit semata bukanlah pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable*). Pertumbuhan yang *sustainable* adalah pertumbuhan yang dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *Stakeholders* yang ada.

Menurut Nicholls, et.al (2009) SROI merupakan suatu kerangka kerja untuk mengukur dan menghitung, SROI bukan sekedar menghitung nilai, SROI berusaha mengatasi masalah ketimpangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Perhitungan didasarkan pada *outcomes*, input, dari mana outcome berasal, dan apa dampaknya. Dan juga memiliki manfaat bagi lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari suatu kegiatan SROI juga dapat membantu kita dalam mengidentifikasi keselarasan antara apa yang ingin dicapai oleh organisasi dengan apa yang ingin dicapai para pemangku kepentingan, Untuk mengukur nilai SROI dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:

Singkatnya, tujuan SROI adalah untuk menguji hubungan antara input dan dampaknya, Dampak tersebut dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan karena adanya suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi yang telah menginvestasikan sejumlah sumber dayanya untuk aktivitas tersebut. Oleh karena itu, SROI dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan dampak yang dihasilkan oleh suatu organisasi (seperti *social enterprise*) atau mengukur suatu aktivitas yang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikerjakan (seperti program/*project*) Sebagaimana yang diungkapkan oleh

© Nichollas et al. (2009):

“Analisis SROI dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. hal ini dapat mencakup nilai sosial yang dihasilkan oleh seluruh organisasi, atau fokus pada satu aspek tertentu dari pekerjaan organisasi. Ada juga sejumlah cara untuk mengatur 'tindakan' SROI, Berikut beberapa langkah penjelasan dalam menghitung SROI agar bermanfaat guna mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki dari sebuah program guna mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam analisis SROI (Purwohedhi et al., 2023).

- 1) Menetapkan cakupan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan pada tahap awal memerlukan pemahaman dua langkah krusial.
 - a) Menentukan Scope /program yang akan dihitung

Sangat penting bagi seorang praktisi SROI untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan sebelum memulai analisis untuk menjawab pertanyaan tentang aktivitas, pembiayaan, dan tujuan. Ini mencakup semua informasi yang diperlukan tentang program atau proyek yang akan dianalisis. Ini akan memberikan pengguna laporan SROI gambaran menyeluruh tentang karakteristik program atau proyek.
 - b) Mengidentifikasi pemangku kepentingan atau penerima manfaat,

Langkah pertama adalah menentukan pemangku kepentingan dalam analisis SROI. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok orang atau organisasi yang merasakan perubahan, baik positif maupun negatif, dari program atau proyek yang sedang dievaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Memetakan dampak (*Mapping outcomes*)

a) Identifikasi *input* dan pemberian nilai *input*

Input SROI terdiri dari tiga jenis sumber daya: uang, waktu, dan barang. Ketiganya adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program atau proyek, jadi SROI ingin memastikan bahwa ketiganya diperhitungkan sebagai nilai investasi.

b) Mengklarifikasi *output*

Output sebuah program atau proyek menunjukkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan segera dari keberadaannya. Praktisi SROI harus menentukan output dari program atau proyek tersebut. Ini dapat dicapai melalui observasi, peninjauan literatur, wawancara, dan percakapan dengan pemangku kepentingan.

c) Menentukan manfaat

mengidentifikasi keuntungan apa yang dirasakan oleh penerima manfaat setelah fasilitas atau program beroperasi. Praktisi SROI harus memperhatikan pendapat penerima manfaat—*stakeholder* yang paling relevan—tentang perubahan yang telah dialami setelah fasilitas atau program dimulai.

3) Membuktikan adanya dampak dan memberinya nilai (*Evidencing outcomes and giving them a value*)

a) Indikator

Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pengguna SROI sebagai bukti bahwa perubahan itu benar-benar terjadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Ukuran keuangan (*Financial proxy*)

Karena nilai nominal dari hasil merupakan salah satu kelebihan SROI yang tidak dimiliki alat analisis lain, tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam implementasi SROI. Di sisi lain, ini juga merupakan tantangan tersendiri. Setiap hasil akan memiliki *proxy* keuangan yang akan digunakan untuk menghitung total hasil (manfaat) program atau proyek.

c) Jangka waktu (*Duration*)

Waktu yang dimaksud adalah jangka waktu di mana orang yang mendapatkan manfaat dari suatu program atau fasilitas akan merasakan dampak dari program tersebut—dengan kata lain, mereka akan dapat merasakan perubahan positif secara signifikan.

4) Memetakan dampak (*Mapping outcomes*)

Setelah melakukan tahap pertama dengan melakukan list para pemangku kepentingan, tahap selanjutnya yaitu impact map yaitu dengan pembuatan peta dampak yang dimulai dari proses hingga perhitungan rasio. Analisis dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan apakah sebuah dampak relevan. Menggunakan *impact map* dalam tahapan SROI dapat membantu mengintegrasikan dimensi visual dan mempermudah pemahaman tentang bagaimana kegiatan proyek atau program menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi

Pada tahap ini dimana kita harus mengestimasi beberapa yang tidak mungkin tapi kita estimasi berapakah nilai dari masing-masing *outcomes*

a) *Deadweight* (Bobot mati)

Mengukur sejumlah *outcome* yang akan terjadi, meskipun aktivitas atau program itu tidak terjadi. Perhitungan dikonversi kedalam bentuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prosentase, kemudian presentase ini akan dikurangkan dengan total *outcome*.

Semakin tinggi *deadweight*, maka nilai *outcome* akan turun

Sehingga jika program tersebut sangat bermanfaat maka bobot matinya (*Deadweight*) maka akan dibuat kecil

Contoh perhitungan *deadweight*. Program perusahaan membangun jembatan dan program ini juga merupakan program pemerintah. Diperoleh informasi dari pemangku kepentingan bahwa program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 2% lebih baik dari program pemerintah. Diasumsikan *benchmarking* yang dipakai adalah 100%, maka ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 102%. Estimasi *deadweight* sebesar 2% lebih baik daripada program pemerintah. Jadi 1 jembatan tersebut merupakan program pemerintah tapi pemerintah belum membangun, keduluan dengan csr perusahaan, Hasil ini merupakan estimasi *Outcome* yang akan terjadi. Jika pemerintah tidak mempunyai program pembangunan jembatan, maka *deadweight* adalah 0 (nol) %, karena memberikan *outcome* yang besar terhadap pemangku kepentingan

b) *Displacement*

Komponen lain dari dampak dan merupakan penilaian tentang seberapa banyak *Outcome* menggantikan *Outcome* yang lain (merupakan efek substitusi). *Displacement* tidak selalu diterapkan dalam analisis SROI, tetapi perlu diperhatikan. Sebagai contoh, Program perbaikan jalan yang sebelumnya rusak, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Ternyata dapat menurunkan tingkat kecelakaan sebesar 20% untuk masyarakat di sekitar jalan tersebut. Maka harus dihitung berapa uang yang dikeluarkan biaya kerumah sakit jika jalan tersebut belum diperbaiki dampak jika Namun, oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena itu jalan menjadi mulus (*Displacement*), Seringkali dipakai para pemuda dari masyarakat sebelah untuk kebut-kebutan (*Displacement Negatif*) Hal ini justru mengganggu masyarakat disekitar jalan tersebut. Dalam hal ini *displacement* perlu dikurangkan dalam *outcome*

c) *Attribution*

Merupakan penilaian *outcome* yang diperoleh dari pihak lain berapakah *outcome* yang diperoleh dari pihak lain. *Attribution* berupa presentase yang nantinya akan dikurangkan dalam *outcome*. *Attribution* merupakan bagian dari *deadweight*, sehingga akan diperoleh informasi yang lebih baik. Contohnya, Program X membangun jembatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi ini juga memperoleh kontribusi dari koperasi desa setempat sebesar 10%, maka *outcome* akan dikurangi sebesar 10%

d) *Dropoff*

Konsep *dropp-off* mengakui bahwa manfaat yang diperoleh pemangku kepentingan tidak akan bertahan lama. Pada tahun-tahun mendatang *outcome* akan semakin berkurang, walaupun sama, kemungkinan dipengaruhi faktor lainnya. Dengan demikian atribusi akan menjadi lebih rendah. *Drop-off* diperhitungkan jika *outcome* mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. *Drop-off* dihitung dengan mengurangi presentase tetap dari sisa *outcome* setiap tahunnya Sebagai contoh, Suatu program mempunyai *outcome* sebesar 200 yang diperkirakan bertahan 4 tahun, tetapi setiap tahunnya mengalami *drop-off* 10%. Pada tahun pertama *outcome* 200, ditahun ke dua *outcome* menjadi 180 (200-10%) ditahun ke tiga 162 (180-10%)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Perhitungan Rasio

- a) Menghitung nilai total input suatu fasilitas di suatu tempat;
- b) Menghitung nilai yang disesuaikan, yaitu nilai setiap manfaat setelah dikurangi filter untuk setiap efek
- c) Kemudian, hitung nilai total setiap hasil dengan menggunakan persentase penurunan selama jangka waktu tertentu;
- d) Setelah itu, hitung total *value* setiap *outcome* dengan menggunakan persentase *drop-off* selama jangka waktu tertentu.
- e) Karena, *net present value* dapat dihitung dengan data total value setiap tahun. Nilai ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio SROI berikut.

$$\text{SROI} = \frac{\text{Present Value Of Impact}}{\text{Present Value Of Investment}}$$

Dalam contoh kasus ini, jika nilai SROI sebesar 2,25, maka dapat dikatakan bahwa nilai SROI tersebut lebih baik jika nilainya lebih besar dari 1. Artinya, setiap 1 Rupiah investasi akan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sebesar 2,25 Rupiah. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi dan dampak positif yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai SROI, semakin besar manfaat yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, nilai SROI yang lebih besar dari 1 mengindikasikan hasil yang lebih menguntungkan dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan.

6) Rekomendasi (report)

Tahap terakhir membuat laporan yang berkaitan dengan survey program apakah semua tahapan yang dilakukan sudah dikomunikasikan dengan baik oleh pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian praktisi SROI harus dapat memastikan bahwa dari perhitungan tersebut benar-benar dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimanfaatkan oleh penggunanya. Sebagai contoh, apabila rasio ini digunakan oleh pemerintah daerah maka rasio SROI tersebut harus mengubah pandangan, cara kerja, sistem pengawasan, Perubahan organisasi dari pemerintah daerah tersebut maupun pemangku kepentingan secara keseluruhan. Jika Rasio SROI yang dihasilkan sangat rendah maka ada proses perbaikan yang dilakukan. Perbaikan berkelanjutan inilah yang akan menjadikan manfaat dari sebuah fasilitas/program dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih

Ramadhani & Venusita, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Tipe Industri dan Kualitas Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia” mengambil sampel pada perusahaan yang mendapat penghargaan di bidang *sustainability report* selama periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kegiatan industri berdampak pada peningkatan kualitas pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang terlibat dalam operasi yang mengeksploitasi sumber daya alam, seperti pada sektor material, utilitas, transportasi, dan energi, menghasilkan jumlah gas buang yang lebih besar. Jumlah emisi ini menjadi fokus utama perusahaan, karena bisa merusak legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor tersebut cenderung lebih proaktif dalam mengungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukannya, terutama yang terkait dengan emisi karbon. Hal ini berarti, semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh perusahaan, maka semakin baik kualitas pengungkapan mengenai emisi karbon tersebut

Kemudian Beske, Haustein & C. Lorson, (2023) dalam *“Materiality analysis in sustainability and integrated reports”* meneliti laporan keberlanjutan dari 33 perusahaan Jerman yang terdaftar pada indeks pasar uang HDAX. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaporan materialitas masih kurang detail dalam menjelaskan proses yang terjadi. Analisis 38 materialitas memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan perusahaan karena pelaporan dan proses yang kurang jelas. Perusahaan pelapor diharapkan dapat mempelajari metode dari perusahaan lain sehingga mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan topik material dengan lebih baik lagi.

Penelitian oleh Santoso et al. (2021) mengkaji transformasi nilai sosial budaya menjadi keuntungan ekonomi dalam Program CSR PT. Bukit Asam Tbk., yang dikenal sebagai Program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Batik Kujur. Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode Social Return on Investment (SROI) untuk mengukur keuntungan dari investasi sosial dalam program tersebut. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan melibatkan 15 informan, dan teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, FGD, observasi, studi literatur, dan studi pustaka. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program SIBA Batik Kujur berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menciptakan perubahan positif. Dampak yang dihasilkan mencakup peningkatan kohesivitas sosial, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kapasitas masyarakat, dan rasa kebanggaan terhadap sejarah leluhur mereka. Program ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan sosial, yang kemudian mendorong transformasi di kalangan pemangku kepentingan dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Hak cipta dimiliki oleh IBIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website IBIKKG.

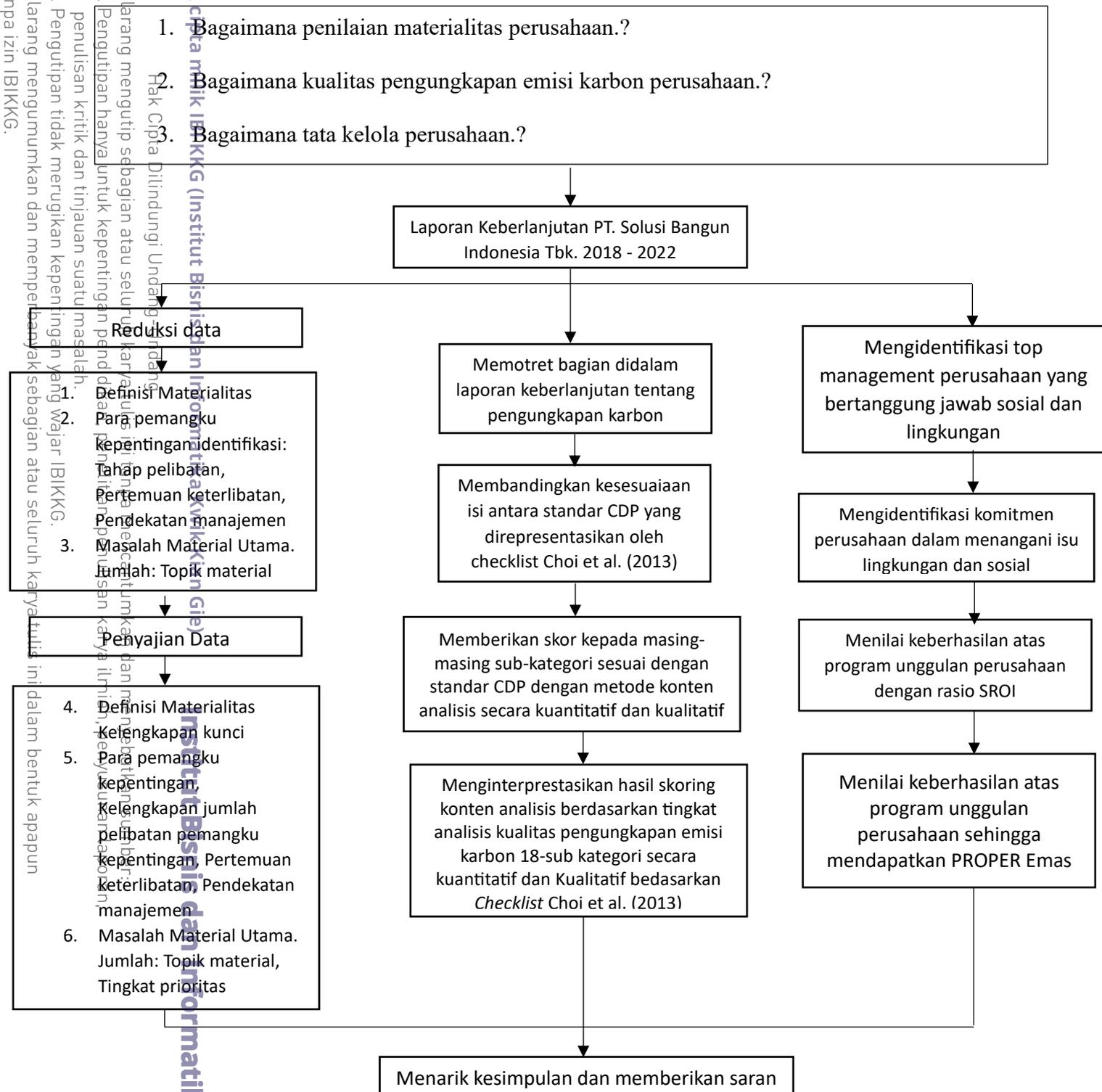
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Alur Penelitian

Gambar 2. 2

Alur Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti